

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan terhadap masyarakat melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi upaya peningkatan kesehatan perorangan dan masyarakat pada setiap lapisan, agar dapat dilayani dengan optimal dan memberikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. Pelayanan kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan dasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga sangat perlu untuk selalu dibenahi, dalam rangka mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan murah.

Usaha dalam bidang kesehatan tersebut sebenarnya telah dirintis oleh pemerintah sejak dahulu, antara lain melalui PT. Askes dan PT. Jamsostek (Persero). PT. Askes dan PT. Jamsostek melayani pegawai negeri sipil, penerima pensiun, veteran, dan pegawai swasta. Untuk masyarakat miskin dan tidak mampu, pemerintah juga memberikan jaminan kesehatan yaitu melalui sistem Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Tetapi sistem-sistem tersebut masih terbagi-bagi antara Askes dengan Jamsostek, sehingga biaya kesehatan serta mutu pelayanan menjadi sulit untuk dikendalikan.

Untuk mengatasi hal tersebut maka pada tahun 2004 dikeluarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). UU No. 40 tahun 2004 ini pada dasarnya berisi bahwa jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. JKN menitik beratkan pada pelayanan kesehatan yang layak untuk seluruh warga. Menurut Undang-Undang No. 40 tahun 2004 tersebut, JKN diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pasal 5 dan 52 UU tersebut, harus dibentuk suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan Undang-Undang untuk mempercepat terselenggaranya sistem jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan adanya JKN diharapkan seluruh penduduk Indonesia akan terlindungi dalam suatu sistem kesehatan nasional. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bertujuan untuk memberikan manfaat terhadap pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Tantangan dalam pelaksanaan JKN ini tidak hanya terletak pada kesiapan infrastruktur dalam pelayanan kesehatan, tetapi juga mengenai ketersediaan sumber daya manusia (SDM) bidang kesehatan. Ketersediaan sarana dan prasarana, tenaga kesehatan, alat kesehatan dan obat-obatan untuk menunjang pelayanan kesehatan masih merupakan suatu masalah yang dapat menghambat pelaksanaan jaminan kesehatan nasional dengan maksimal.

Saat ini di Indonesia, jumlah tenaga kesehatan mencukupi tetapi ketersediaannya terkendala oleh penyebarannya yang tidak merata. Menurut data dari kementerian kesehatan pada tahun 2016 jumlah tenaga kesehatan lebih banyak di kota-kota besar sedangkan untuk di daerah-daerah pedesaan dan daerah terpencil masih kekurangan tenaga kesehatan, obat-obatan dan sarana prasarana, sehingga pelayanan kesehatannya masih sangat minim/kurang. Salah satu program SJSN adalah program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang akan menjamin pesertanya untuk memperoleh manfaat dalam pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya.

Program ini telah dimulai sejak 1 Januari 2014 dan diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang merupakan hasil transformasi PT. Askes (Persero). Dalam UU SJSN tersebut disebutkan bahwa seluruh rakyat Indonesia wajib menjadi peserta program ini dan juga wajib membayar iurannya. Khusus iuran bagi fakir miskin dan orang tidak mampu, UU ini mengamanahkan kepada Pemerintah untuk membayarnya. Sejak diundangkannya UU BPJS tersebut, fasilitas kesehatan mulai ditingkatkan, tetapi kondisi ini masih belum terlaksana dengan maksimal.

Puskesmas merupakan pilar dari pelayanan dasar dalam bidang kesehatan, sehingga puskesmas sangat penting perannya dalam penyelenggaraan Sistem Jaminan Nasional. Mengingat pentingnya peranan puskesmas dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan tersebut maka sangat diperlukan kesiapan puskesmas terhadap sumber-sumber daya yang ada dan dukungan dari berbagai pihak dalam menunjang terlaksananya Sistem Jaminan Kesehatan ini. Sehingga berdirinya sebuah puskesmas harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan kesehatan, ketenagaan, kefarmasian dan laboratorium (DepKes, 2014).

Fasilitas kesehatan (Faskes) berkewajiban menjamin tersedianya alat-alat kesehatan yang bermutu, aman dan laik pakai, sebab apabila alat kesehatan tersebut tidak bermutu, aman dan baik pakai maka akan mengakibatkan proses pelayanan terhadap kesehatan menjadi terganggu. Alat kesehatan tidak hanya terkait dengan prosedur/tindakan diagnosa, kuratif, rehabilitatif tetapi juga mencakup promotif, preventif, dan paliatif. Selain itu alat kesehatan merupakan produk teknologi yang bebas dari resiko yang dapat membahayakan pasien, tenaga kesehatan dan lingkungan. Sehingga alat kesehatan dan bangunan merupakan aset puskesmas yang nilai investasinya besar.

Sejak tahun 2014, program JKN yang diselenggarakan oleh BPJS menuntut puskesmas harus dapat menangani 144 jenis diagnosa, sebagaimana yang tercantum dalam SKDI (Standar Kompetensi Dokter Indonesia) tahun 2012, yang artinya bahwa 144 penyakit tersebut harus dilayani di Puskesmas sehingga tidak boleh dirujuk ke Fasilitas Kesehatan tingkat lanjutan. Tetapi dalam kenyataannya dari 144 diagnosa yang harus ditangani di Puskesmas tersebut, masih banyak diagnose penyakit yang dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Lanjutan yaitu Rumah Sakit.

Puskesmas dan JKN adalah dua hal yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Pemberian layanan kesehatan yang baik di puskesmas akan memungkinkan banyak peserta JKN yang memanfaatkan pelayanan kesehatan, hal ini juga berdampak sebaliknya jika pelayanan kesehatan di puskesmas dirasa buruk atau kurang baik.

Puskesmas Batang toru merupakan salah satu puskesmas yang berada di Kabupaten Tapanuli Selatan Propinsi Sumatera Utara yang berdiri pada Tahun 1974. Puskesmas ini tepatnya berada di kelurahan Wek II Kecamatan Batang Toru yang terdiri dari 3 puskesmas pembantu meliputi 19 desa dan 4 kelurahan, dan merupakan puskesmas rawat inap.

Berdasarkan survei peneliti, menemukan rendahnya pemanfaatan program JKN oleh masyarakat dimana konsumen baik dari segi usia, pendidikan, pekerjaan, ketersediaan tenaga kesehatan, jarak ke lokasi pelayanan, perilaku petugas, dan persepsi sakit dapat mempengaruhi pasien untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan, serta akses jalan menuju puskesmas yang buruk dapat mempengaruhi minat untuk

memanfaatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas.

Program JKN ini bertujuan untuk memberikan jaminan kesehatan menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera. Undang-undang ini sesuai dengan rekomendasi dari resolusi *World Health Assembly* (WHA) ke-58 tahun 2005 di Jenewa, agar negara mengembangkan sistem pembiayaan kesehatan dengan tujuan menjamin kesehatan bagi seluruh rakyat (Putri, 2016).

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) bersama 13 kementerian dan lembaga telah membuat sasaran pokok beserta dengan kegiatan-kegiatan yang akan dicapai oleh penyelenggara JKN pada tahun 2019. Agar dapat mencapai *Universal Coverage* terdapat delapan sasaran pokok yang akan dicapai pada tahun 2019, yaitu; BPJS Kesehatan beroperasi dengan baik, seluruh Penduduk Indonesia (yang pada 2019 diperkirakan sekitar 257,5 juta jiwa) mendapat jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan, paket manfaat medis dan non medis (kelas perawatan) sudah sama, tidak ada perbedaan, untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, jumlah dan sebaran fasilitas pelayanan kesehatan (termasuk tenaga dan alat alat) sudah memadai untuk menjamin seluruh penduduk memenuhi kebutuhan medis mereka, semua peraturan pelaksanaan telah disesuaikan secara berkala untuk menjamin kualitas layanan yang memadai dengan harga keekonomian yang layak. Paling sedikit 85% peserta menyatakan puas, baik dalam layanan di BPJS maupun dalam layanan di fasilitas kesehatan yang dikontrak BPJS, paling sedikit 80% tenaga dan fasilitas kesehatan menyatakan puas atau 4 mendapat pembayaran yang layak dari BPJS, dan BPJS dikelola secara terbuka, efisien, dan akuntabel (Putri, 2016).

Berdasarkan data kunjungan pasien dari Puskesmas Batang Toru, sepanjang tahun 2018 dari 8.737 pasien, 3.372 (38,59%) diantaranya masih belum menggunakan asuransi kesehatan dalam menggunakan pelayanan kesehatan. Untuk bulan Januari sampai Juni tahun 2019, ada 4.125 kunjungan pasien dan hanya 994 pasien yang menggunakan JKN atau diperkirakan sekitar 24% sedangkan sisanya 76% pasien belum menggunakan JKN. Data tersebut menunjukkan masih kurangnya jumlah pasien yang berobat ke Puskesmas Batang Toru yang memanfaatkan JKN.

Berdasarkan latarbelakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian tentang “Faktor yang Berhubungan dengan Pemanfaatan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019”.

1.2. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, permasalahan dalam peneltiian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah ada hubungan karakteristik individu (umur, pendidikan dan pekerjaan) dengan pemanfaatan program Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019?
2. Apakah ada hubungan karakteristik kemampuan (ketersediaan tenaga kesehatan dan aksesibilitas lokasi) dengan pemanfaatan program Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019?
3. Apakah ada hubungan karakteristik kebutuhan (persepsi sakit) dengan pemanfaatan program Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019?

4. Faktor-faktor apa saja yang berhubungan secara signifikan dan dominan dengan pemanfaatan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Batang Toru Kecamatan Tapanuli Selatan tahun 2019?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum pada penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan pemanfaatan program Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019.

1.3.2. Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan dari penelitian ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan karakteristik individu (umur, pendidikan dan pekerjaan) dengan pemanfaatan program Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan karakteristik kemampuan (ketersediaan tenaga kesehatan dan aksesibilitas lokasi) dengan pemanfaatan program Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan karakteristik kebutuhan (persepsi sakit) dengan pemanfaatan program Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang berhubungan secara signifikan dan dominan dengan pemanfaatan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Batang Toru Kecamatan Tapanuli Selatan tahun 2019.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini secara umum diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang kesehatan masyarakat tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan program JKN. Secara khusus, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Selatan
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan dan informasi tentang pentingnya pemanfaatan program JKN di Kabupaten Tapanuli Selatan sehingga kualitas kesehatan masyarakat dapat meningkat.
2. Puskesmas Batang Toru
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk peningkatan pelayanan kepada pasien yang belum memanfaatkan Program JKN di Puskesmas Batang Toru sehingga masyarakat mengenal dan bersedia untuk bergabung dalam program JKN.
3. Universitas Prima
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan referensi perpustakaan hingga menjadi dasar pemikiran untuk pelaksanaan penelitian yang selanjutnya.